

### **BAB III**

## **TERBENTUKNYA *TRANS – PACIFIC PARTNERSHIP* (TPP) DAN BERGABUNGNYA JEPANG DALAM KEANGGOTAAN *TRANS – PACIFIC PARTNERSHIP* (TPP)**

Pasca kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang telah memutuskan untuk memfokuskan pertumbuhan negaranya melalui bidang ekonomi. Kekuatan militer Jepang tidak lagi dapat menjadi kekuatan utama negaranya, sehingga melakukan perpindahan fokus dari militer ke bidang ekonomi untuk menjadi kekuatan bagi negara Jepang. Beberapa strategi yang dilakukan Jepang untuk bangkit, yaitu dengan membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, serta bergabung ke dalam beberapa organisasi internasional, salah satunya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 1989. Dengan menjalin kerjasama, Jepang ingin mendapatkan keuntungan bagi negaranya, serta dapat mensejahterakan rakyatnya. Sehingga Jepang pun tidak hanya fokus pada beberapa organisasi internasional, tetapi juga ingin melakukan perjanjian dagang yang dapat berdampak pada kemakmuran ekonomi Jepang.

Dalam pembahasan bab ini, perjanjian dagang yang menjadi fokus utama dan menarik untuk dibahas yaitu bergabungnya Jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Hal unik dari perjanjian dagang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah bagaimana tata aturan perjanjian dagang yang ada dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan bagaimana Jepang memutuskan untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

## **A. Proses Terbentuk & Karakteristik *Trans-Pacific Partnership* (TPP)**

*Trans-Pacific Partnership* (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan untuk mendorong liberalisasi perdagangan dengan memangkas tarif produk dan jasa antar negara. Perjanjian dagang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dengan perjanjian dagang lainnya. Yang nantinya akan di bahas dalam beberapa poin. Dari awal terbentuknya *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan keunikan yang ada dalam perjanjian dagang *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

### **1. Terbentuknya *Trans-Pacific Partnership* (TPP)**

Sebelum kemunculan *Trans-Pacific Partnership* (TPP), diawali dengan kemunculan *Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement* (TPSEPA). Ia hadir disela-sela puncak forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 2002. Yang pada saat itu hanya tiga negara, yaitu Selandia Baru, Chili, dan Singapura atau dikenal dengan *Pacific Three* (P3). Kemudian ditambah dengan bergabungnya Brunei Darusalam ke dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sehingga dikenal dengan *Pacific Four* atau dengan sebutan P4 yang bertujuan untuk membuat perjanjian perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian ini sebagai bentuk liberalisasi perdagangan di antara negara anggota *Pacific Four* yakni Singapura, Chili, Selandia Baru, dan Brunei Darusalam yang menandatangani kesepakatan kerjasama buruh dan perjanjian kerjasama. Dapat dikatakan dengan adanya *Pacific Four* (P4), maka menjadi semakin menarik diperbincangkan dalam pembahasan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Karena Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sendiri merupakan forum kerjasama ekonomi yang menjadikan isu integrasi ekonomi

kawasan sebagai salah satu agenda utama (Kementerian Luar Negrei RI, 2019).

Perjanjian *Pacific Four* memberikan gambaran tentang bentuk latar belakang, instrument, konsep, dan tujuan liberalisasi perdagangan. Yang mana negara-negara lain menaruh perhatian terhadap perjanjian tersebut, sehingga satu persatu negara anggota Asia Pacific Economic Cooperetion (APEC), seperti Amerika Seikat, Australia, Peru, Vietnam, dan Malaysia memutuskan untuk bergabung dalam perjanjian *Pacific Four* (Kementerian Luar Negrei RI, 2019). sehingga *Trans-Pacific Partnership* (TPP) mulai aktif diberlakukan pada tahun 2006. Pada Tahun 2008, Vietnam, Peru, dan Australia ikut bergabung dan kemudian Amerika Serikat yang pada waktu itu dipimpin oleh George Walker Bush, menyatakan bahwa Amerika Serikat ikut bergabung. Salah satu alasan utamanya yang dikutip dari laporan tahunan 2008 Presiden Amerika Serikat pada program perjanjian perdagangan, yaitu:

“Dengan bergabungnya Amerika Serikat dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) diharapkan dapat memposisikan perekonomian Amerika Serikat lebih baik lagi agar dapat bersaing di Kawasan Asia-Pasifik. Hal tersebut dilihat dari perkembangan perjanjian perdagangan preferensial antara pesaing Amerika Serikat serta pengembangan terhadap beberapa inisiatif integrasi ekonomi regional yang bersaing dengan melarang Amerika Serikat masuk di dalamnya.” Setelah Amerika Serikat menyatakan minatnya untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP), yang kemudian semakin diperkuat dengan adanya pernyataan resmi dari perwakilan dagang Amerika Serikat Susan C Schwab pada bulan September 2008 (Schwab, 2008).

Pada tahun 2010, Malaysia bergabung dalam *Pacific Four* atau P4 yang kemudian berganti nama menjadi *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) sebagai sebuah bentuk perjanjian yang baru. Tujuan pergantian nama tersebut untuk memperluas jangkauan keanggotaan. Perjanjian *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) pada akhirnya memiliki 9 anggota baru, di mana 9 anggota tersebut merupakan anggota dari Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) kemudian membentuk sebuah badan pengawasan yang berstandar tinggi yaitu *Trans Pacific Strategic Economic Partnership Commission* yang bertujuan untuk bertanggung jawab atas administrasi perjanjian. Sementara itu terbentuknya badan ini mempunyai kuasa untuk membuat suatu pertemuan di tingkat menteri atau sekelas pejabat-pejabat senior yang mampu mempresentasikan dari negara-negara anggota perjanjian. Adapun tujuan utama terbentuknya badan ini sebenarnya untuk mengawasi kinerja komite kerja yang dinaungi oleh perjanjian *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP), seperti bertanggung jawab atas implementasi perjanjian, pendekatan kesepakatan, pertimbangan jika terdapat proposal untuk melakukan amandemen, serta menentukan langkah-langkah untuk melakukan ekspansi perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota dan mengidentifikasi area kerjasama komersial, industri dan teknis, serta mempertimbangkan segala hal yang dapat mempengaruhi operasi perjanjian perdagangan ini (Andri, 2013).

Pada tahun 2012, Kanada dan Meksiko bergabung dalam keanggotaan *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) yang kemudian perjanjian perdagangan ini dinamakan dengan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ini. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat bergabung menjadi anggota dan mengusulkan negosiasi mengenai perjanjian baru yang disebut sebagai *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Ada juga beberapa alasan Amerika Serikat bersikap demikian, hal

ini dikarenakan Tiongkok muncul sebagai sebuah negara *global power* yang menciptakan aturan-aturan ekonomi baru di Asia (Sanusi, 2015).

Pada tahun 2015, para menteri dan 12 negara anggota yang tergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yaitu Australia, Brunei Darusalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam mengumumkan hasil diskusi mereka. Dengan hasil perjanjian standar tinggi, ambisius, komprehensif, dan seimbang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendukung penciptaan dan retensi pekerjaan, meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saing, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan di negara masing-masing anggota, dan mempromosikan transportasi, tata pemerintahan yang baik, tenaga kerja ditingkatkan dan perlindungan lingkungan. Dengan standar baru dan tinggi tersebut, diharapkan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik semakin mudah dan meningkat (Office of the United States Trade Representative, 2015).



**Gambar 3.2** Peta negara-negara anggota *Trans Pacific Partnership* (TPP)

Sumber: Nursya'bani, 2017.

Pada 4 Februari 2016, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) resmi ditandatangani oleh 12 negara anggotanya di Selandia Baru. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) juga merupakan kesepakatan perjanjian perdagangan yang paling komprehensif yang pernah dinegosiasikan antara negara maju dan negara berkembang (Schott, et.al., 2016). Menurut *United State Trade Representative* (USTR), *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan sebuah perjanjian perdagangan “yang komprehensif dan berstandar tinggi” yang khusus dirancang untuk menghilangkan serta mengurangi hambatan perdagangan guna membangun dan memperluas aturan dan disiplin dari sistem perdagangan antar negara anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Jika terealisasikan, nantinya *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan menjadi perjanjian perdagangan terbesar dengan nilai perdagangan sekitar 40% dari *Produk Domestik Bruto* (PDB) dunia dan berfungsi untuk mengintegrasikan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang dinamis. Sebagai sebuah “kesepakatan hidup”, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) memiliki potensi untuk bernegosiasi dengan aturan baru dan memperluas keanggotaannya (Office of the United States Trade Representative, 2015).

Kerja sama perdagangan ini merupakan traktat untuk membendung ekspansi perdagangan Tiongkok. Traktat ini merepresentasikan 40 persen *Pendapatan Domestik Bruto* (PDB) dunia karena negara-negara yang tergabung di dalamnya memiliki dominasi *Pendapatan Domestik Bruto* (PDB) global. Amerika Serikat khususnya, memiliki *Pendapatan Domestik Bruto* (PDB) sebesar US\$ 17,41 triliun atau 16,3 persen terhadap total perekonomian global pada akhir 2014. Ditambah dengan negara anggota lainnya, Jepang sebesar US\$ 4,60 triliun, Kanada sebesar US\$ 1,79 triliun, Australia sebesar US\$ 1,45 triliun, Meksiko sebesar US\$ 1,28 triliun, Malaysia sebesar US\$0,326 triliun, Singapura sebesar US\$ 0,307 triliun, Chili sebesar US\$ 0,258 triliun, Peru sebesar US\$ 0,202 triliun, Selandia Baru sebesar US\$ 0,188 triliun, Vietnam sebesar US\$ 0,186

triliun, dan Brunei sebesar US\$ 0,017 triliun (World Bank, 2019).

## **2. Karakteristik yang ada dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebagai perjanjian dagang**

*Trans-Pacific Partnership* (TPP) dianggap sebagai kesepakatan perdagangan yang penting dan berstandar tinggi. Karena dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan meningkatkan bidang ekonomi yang meliputi perdagangan, investasi, mempromosikan inovasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta menciptakan lapangan pekerjaan antar anggota-anggota yang bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dalam perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) terdapat sebuah keistimewaan yang mana menjadikan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) hal yang bersejarah pada abad ke-21, dikarenakan akses pasar komprehensif, komitmen pendekatan regional, mengatasi tantangan perdagangan baru, perdagangan inklusif serta tempat untuk integrasi regional (Office of the United States Trade Representative, 2015). Terdapat lima fitur yang mendefinisikan perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebagai model kerja sama abad ke-21, yaitu sebagai berikut.

Pertama, adanya akses pasar komprehensif. Dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP), nantinya akan menghilangkan serta mengurangi hambatan tarif maupun hambatan non tarif dalam perdagangan barang dan jasa yang mencakup aspek perdagangan, termasuk investasi barang dan jasa sehingga menciptakan peluang dan juga manfaat baru bagi bisnis, pekerja, dan para konsumen. Sehingga akan memudahkan kegiatan perdagangan barang dan jasa bagi anggota-anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Kedua, adanya pendekatan regional. Dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dalam komitmen pendekatan regional, maka akan memfasilitasi pengembangan produksi

dan distribusi barang produksi, memperlancar perdagangan, meningkatkan efisiensi serta mendukung tujuan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) untuk menciptakan dan mendukung pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kesejahteraan, meningkatkan upaya-upaya konservasi, memfasilitasi integrasi lintas batas serta membuka pasar domestik.

Ketiga, adanya tantangan mengatasi perdagangan baru. Dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP), maka akan mempromosikan inovasi kreatif, produktivitas dan daya saing yang meliputi isu-isu baru, termasuk perkembangan ekonomi digital, serta bagaimana peran perusahaan milik negara dalam ekonomi global.

Keempat, adanya perdagangan inklusif. Dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP), maka akan mencakup unsur-unsur baru yang kemudian memastikan bahwa ekonomi di semua tingkat pembangunan dan bisnis dari semua ukuran dapat memberikan keuntungan dalam perdagangan. Karena dengan keuntungan yang ada dapat memberikan bantuan kepada usaha bisnis kecil hingga bisnis menengah untuk memahami perjanjian, memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dan membawa tantangan-tantangan sehingga menjadi perhatian dari pemerintah *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Serta tidak lupa komitmen pada pembangunan dan pengembangan kapasitas perdagangan yang mana hal tersebut berguna untuk memastikan semua pihak dapat mencapai kesepakatan dalam setiap perjanjiannya serta mendapatkan keuntungan penuh dari perjanjian yang sudah dibuat.

Dan yang terakhir *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebagai tempat integrasi regional. Dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebagai tempat integrasi regional, TPP dimaksudkan sebagai tempat untuk integrasi ekonomi regional dan dirancang untuk menambahkan kegiatan

perekonomian baru di kawasan Asia Pasifik. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) juga memiliki cakupan yang terdiri dari 30 bab mengenai perdagangan dan isu perdagangan; memperbarui pendekatan tradisional yang dicakup dalam perdagangan bebas sebelumnya *Free Trade Area* (FTA) yang merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih untuk membangun sebuah area perdagangan bebas di mana perdagangan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilakukan dengan melampaui batas-batas umum (misalnya geografis), tariff atau penghalang. yang mana *Free Trade Area* (FTA) dan juga *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menyatukan berbagai kelompok negara berdasarkan geografi, bahasa, sejarah maupun tingkat pembangunan (Office of the United States Trade Representative, 2015).

Terdapat beberapa aturan-aturan perdagangan regional yang diatur dalam 30 bab *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang mana meliputi ketentuan awal dan definisi umum, perdagangan barang, tekstil dan pakaian, ketentuan asal barang, administrasi bea cukai dan fasilitasi perdagangan, aturan sanitari dan *phytosanitary*, hambatan teknis perdagangan, perbaikan perdagangan, investasi, layanan perdagangan lintas batas, pelayanan keuangan, *temporary entry* untuk pelaku bisnis, telekomunikasi, pengadaan pemerintah, kebijakan persaingan, perusahaan milik negara dan *designated monopolies*, hak milik *intellectual*, tenaga kerja, lingkungan hidup, kerjasama dan pengembangan kapasitas, persaingan dan fasilitas bisnis, pengembangan usaha kecil dan menengah, *regulatory coherence*, transparansi dan anti korupsi, ketentuan administrasi dan institusional, penyelesaian sengketa, pengecualian serta mengenai ketentuan akhir (Office of the United States Trade Representative, 2015).

Dalam aturan ketentuan awal dan definisi umum, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat hidup berdampingan dengan perjanjian perdagangan internasional lainnya, termasuk perjanjian World Trade Organization (WTO), perjanjian

bilateral dan juga perjanjian regional. Di perdagangan barang aturan yang diberlakukan, anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) setuju untuk menghilangkan hambatan tarif maupun non-tarif terhadap barang-barang industri dan juga mengurangi ataupun menghilangkan tarif dan kebijakan pembatasan lainnya terhadap barang pertanian. Apabila ada negara yang tergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) mempertahankan persyaratan impor barang & jasa maka akan diberitahukan tentang prosedur untuk meningkatkan transparansi dan memfasilitasi arus perdagangan. Di dalam produk pertanian, pihak tergabung *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan menghilangkan ataupun mengurangi tarif dan kebijakan restriktif lainnya yang mana hal ini akan meningkatkan perdagangan pertanian di wilayah tersebut dan juga akan meningkatkan ketahanan pangan. Pihak *Trans-Pacific Partnership* (TPP) juga akan mempromosikan reformasi kebijakan termasuk juga menghilangkan subsidi ekspor pertanian, bekerjasama dengan World Trade Organization (WTO) dalam mengembangkan disiplin pada perusahaan perdagangan ekspor negara, kredit ekspor serta memberikan batasan waktu ekspor makanan untuk memberikan keamanan pangan yang lebih besar. Para anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) juga sepakat untuk meningkatkan transparansi dan kerjasama pada kegiatan-kegiatan yang terkait dalam bioteknologi pangan.

Mengenai aturan yang mana anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) setuju menghapuskan tarif pada tekstil dan pakaian jadi. Hal ini menyangkut aturan spesifik yang mengharuskan penggunaan benang dan kain dari negara anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dengan tujuan untuk mempromosikan rantai pasokan regional dan investasi pada sektor tekstil dan pakaian jadi. Selain itu juga mencakup komitmen pada kerjasama bea cukai dan penegak aturan untuk mencegah penghindaran tugas, penyelundupan dan penipuan serta perlindungan khusus tekstil dalam menanggapi kerusakan yang serius ataupun ancaman pada industri domestik jika tiba-

tiba terjadi lonjakan impor. Anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menerapkan aturan untuk memastikan semua bisnis dapat mudah beroperasi di seluruh wilayah *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dengan menciptakan system *Trans-Pacific Partnership* (TPP) untuk menunjukkan dan memverifikasi barang yang dibuat oleh *Trans-Pacific Partnership* (TPP) telah memnuui standar asal. Importer akan dapat mengklaim perlakuan tariff preferensial selama memiliki dokumentasi untuk mendukung klain yang diajukan.

Dalam hubungan dagang tentunya ada hambatan teknis perdagangan yang mana dalam mengembangkan aturan ini, pihak *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menyetujui peraturan yang bersifat transparan dan tidak berpihak untuk mengembangkan peraturan teknis, standar prosedur penilaian kesesuaian dan juga mempertahankan kemampuan pihak *Trans-Pacific Partnership* (TPP) untuk memenuhi tujuan yang sah. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menyetujui untuk bekerjasama dalam memastikan bahwa peraturan dan standar teknis tidak menciptakan hambatan perdagangan. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) juga mencakup aturan-aturan sektor khusus untuk mempromosikan pendekatan pengaturan umum di seluruh wilayah *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang meliputi sektor kosmetik, peralatan medis, farmasi, produk teknologi informasi dan komunikasi, anggur dan *distilled spirits*, produk pertanian global. Mengenai perbaikan perdagangan cenderung untuk mempromosikan transparansi dan proses hukum melalui pengakuan praktik terbaik, tetapi tidak mempengaruhi hak dan kewajiban pihak *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di bawah World Trade Organization (WTO). Selain itu juga mengatur mekanisme perlindungan transisional yang memungkinkan suatu pihak untuk menerapkan tindakan pengamanan transisional selama periode waktu tertentu apabila impor meningkat akibat pemotongan tarif yang dilaksanakan di bawah *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Dalam hal investasi di *Trans-Pacific Partnership* (TPP), anggota-anggota negara menetapkan peraturan yang mensyaratkan kebijakan dan perlindungan non-diskriminatif yang menjamin perlindungan hukum aturan-aturan dasar, sekaligus melindungi kemampuan pemerintah anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dalam mencapai tujuan kebijakan public yang valid. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) juga memberikan perlindungan investasi dasar serta menyediakan arbitrase internasional yang netral dan transparan dari persengketaan investasi dengan perlindungan yang kuat serta memastikan hak pemerintah untuk mengatur demi kepentingan publik termasuk kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan. Aturan mengenai layanan perdagangan lintas batas yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menyetujui untuk mengatur langkah-langkah penerapan umum dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak serta menerima persyaratan transparansi dalam pengembangan peraturan layanan baru. Mencakup juga lampiran-lampiran pelayanan profesional yang mendorong kerjasama dalam permasalahan regulasi dan perizinan serta lampiran pelayanan pengiriman ekspres.

Dalam aturan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) memiliki Kebijakan persaingan yang mana kepentingannya untuk memastikan kerangka kerja kompetisi yang adil di kawasan melalui aturan yang mengharuskan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) mempertahankan rezim hukum yang melarang perilaku bisnis anti persaingan serta kegiatan iklan penipuan dan menipu yang mana hal tersebut dapat merugikan konsumen. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) juga setuju untuk membentuk atau mempertahankan otoritas yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum persaingan nasional, serta mengadopsi ataupun mempertahankan undang-undang atau peraturan yang melarang kegiatan curang dan menipu yang menyebabkan ancaman bahaya terhadap konsumen.

## **B. Pro & Kontra Hingga Bergabungnya Jepang dalam Keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP)**

Keputusan Jepang untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan keputusan yang tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam negeri. Seperti yang kita ketahui *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas multilateral yang bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Bergabungnya Jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe. Beliau mengumumkan keinginannya untuk bergabung ke dalam perundingan perdagangan bebas atau *Trans-Pacific Partnership* (TPP) atau kemitraan Trans-Pasifik. Keputusan Perdana Menteri Shinzo Abe bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena tujuan dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) itu sendiri adalah menjadikan lautan pasifik sebagai lautan di mana barang, jasa, dan investasi bebas bergerak. Shinzo Abe pun menuturkan bahwa negara-negara yang perekonomiannya berkembang pesat di Asia telah membuka ekonominya masing-masing, sehingga bergabungnya jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat membuka peluang Jepang di Asia. (BBC, 2013)

### **1. Pro & Kontra Rencana Jepang bergabung dalam Keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP)**

Penting bagi Jepang untuk tetap menjaga kekuatan ekonomi di Asia. Dalam perannya, Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengartikulasikan strategi pertumbuhan ekonomi multi-cabang di mana liberalisasi perdagangan dan pengejaran perjanjian perdagangan bebas, termasuk *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah bahan utama. Selain itu, Perdana Menteri Shinzo Abe telah menempatkan barisan kuat eksekutif pro pemerintah dan partai *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di

Toshimitsu Motegi sebagai Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri; Yoshimasa Hayashi sebagai Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Masahiko Komura sebagai wakil presiden *Liberal Democratic Party* (LDP). Perdana Menteri Shinzo Abe menerima bahwa kunci keberhasilan pemerintahannya dan popularitas publik yang berkelanjutan adalah mempertahankan prospek kuat untuk pertumbuhan ekonomi Negara Jepang. Sementara perlambatan dalam ekonomi Jepang mungkin membuat *Trans-Pacific Partnership* (TPP) bahkan lebih dari keharusan ekonomi. Perdana Menteri Shinzo Abe akan merasa lebih sulit secara politis untuk memenuhi strategi perdagangannya jika kesulitan ekonomi melemahkan dukungan publik untuk pemerintahannya (Abe, 2013).

Pada era pasca Perang Dunia II, Jepang telah mengubah dirinya menjadi industri terkemuka bangsa. Industri manufaktur, termasuk industri otomotif, telah menjadi industri terkemuka untuk Jepang. Namun, industrialisasi yang cepat menyebabkan urbanisasi dan migrasi tenaga kerja dari daerah pedesaan ke perkotaan. Akibatnya, sektor pertanian diserahkan kepada pekerja lanjut usia. Sementara itu nilai tambah dari produk pertanian jauh lebih rendah, menyebabkan semakin sedikit menarik bagi generasi muda. Akibatnya, sektor pertanian menjadi kurang kompetitif. Sejak era pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah Jepang telah mengambil sejumlah kebijakan perlindungan, termasuk subsidi besar, untuk melindungi para petani. Namun, pada abad ke-21, globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi aturan hari ini, dan Jepang juga harus bergabung dengan itu. Untuk mengantisipasi masuknya harga rendah impor produk pertanian, pemerintah Jepang mengimplementasikan kebijakan tidak hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk memberdayakan para petani, dan untuk membuat sektor pertanian di Jepang lebih kompetitif (Nurdiniyah, 2019).

Pemerintah Jepang telah bergerak maju dengan serangkaian inisiatif perdagangan penting, berpartisipasi dalam

pembicaraan putaran pertama tentang perjanjian *Free Trade Area* (FTA) dengan China dan Korea Selatan pada bulan Maret. Serius membicarakan tentang perjanjian kemitraan ekonomi Jepang-UE pada bulan April, dan negosiasi perdana mengenai *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang diusulkan pada bulan Mei. Karena menandatangani perjanjian ini akan memiliki efek pertumbuhan positif pada ekonomi Jepang baik dengan meningkatkan volume perdagangan dan investasi asing langsung ke Jepang, dan meningkatkan lingkungan produksi dan investasi untuk jaringan produksi pabrikan Jepang di Asia Timur. Jepang mengakui bahwa Jepang adalah pusat negosiasi kemitraan ekonomi yang melibatkan Asia, Eropa, dan lingkaran pasifik, dan karena itu berada dalam posisi di mana ia dapat mengerjakan semuanya secara bersamaan. Dengan melakukan negosiasi pada perjanjian perdagangan yang berbeda secara paralel, strategi perdagangan Jepang berpotensi difasilitasi dengan mampu memanfaatkan keuntungan dalam satu perjanjian untuk memfasilitasi keuntungan yang sama di yang lain. Secara khusus, administrasi Perdana Menteri Shinzo Abe melihat *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebagai penentu kecepatan untuk *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dimana Jepang berharap dapat memanfaatkan keuntungan dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebagai perjanjian tingkat tinggi untuk mencapai penghapusan pembatasan investasi dan tarif ekspor industri ke negara-negara *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) (Mulgan, 2013).

Namun, dalam proses bergabungnya Jepang, pro dan kontra yang terjadi dalam lingkup domestik sendiri, yaitu para petani Jepang menentang rencana keikutsertaan Jepang dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena mereka mengkhawatirkan dampaknya terhadap sektor pertanian Jepang yang akan terpuak dengan banjirnya produk pertanian impor yang lebih murah. Bagi Jepang pertanian ialah kepentingan nasional yang sangat fundamental. Alasan mengapa sektor pertanian dianggap sensitif sebenarnya

beraneka ragam dengan latar belakang politis, social serta bisnis. *Liberal Democratic Party* (LDP) dan *Social Democratic Party of Japan* (SDPJ) dua partai besar di Jepang, sudah sejak lama bergantung dengan suara petani dalam pemilihan umum. Karena hal itu, pemberian subsidi kepada para petani menjadi salah satu prioritas mereka dalam rangka menjaga kepercayaan dan terutama apa yang disuarakan oleh para petani. Partai *Liberal Democratic Party* (LDP) yang awalnya dibentuk untuk menentang masuknya Jepang ke dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ("kelompok yang menuntut penarikan segera dari partisipasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP)"), yang mencakup lebih dari 60% anggota Diet *Liberal Democratic Party* (LDP), kemudian telah mengubah tujuannya menjadi "kelompok yang akan melindungi nasional agar tertarik pada negosiasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), "dengan demikian menggeser target kebijakannya menjadi negosiasi kondisi. *Liberal Democratic Party* (LDP) juga berulang kali menegaskan bahwa mereka akan melindungi pengecualian untuk mendapatkan dukungan partai dari organisasi yang menentang *Trans-Pacific Partnership* (TPP), seperti koperasi pertanian, sementara pemerintah meyakinkan sektor pertanian bahwa pengecualian akan dicari untuk lima item utama (beras, gandum, daging sapi, produk susu, dan pemanis) yang telah dilindungi oleh sejarah panjang Jepang.

Pemerintah Shinzo Abe sangat memperhatikan suara para petani dalam pemilihan pedesaan yang beranggota tunggal, yang akan menjadi kunci untuk mengamankan mayoritas kursi di Majelis Tinggi. Kementerian luar negeri telah mengakui bahwa fokusnya sekarang sebagian pada berapa lama masa tenggang Jepang dapat mengamankan sebelum menghapuskan tarif pada barang-barang utama, sementara kementerian pertanian, kehutanan, dan perikanan telah mulai berkonsentrasi pada prospek membangun kembali pertanian selama masa tenggang ini. Karena *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menganut prinsip penghapusan semua tarif dalam sepuluh tahun dan mencakup negara-negara pengeksport pertanian yang

kuat seperti Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, Jepang akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan pengecualian untuk semua item utama. Pendekatan yang lebih fleksibel dan akomodatif akan mencegah posisi negosiasi Jepang di bidang pertanian dari menjadi hambatan bagi kemajuan dalam pembicaraan perdagangan, seperti yang secara historis terjadi.

Beberapa penolakan juga karena Jepang sudah mengalami ketergantungan yang (menurut mereka) para petani tingga pada makanan impor. Dan juga usaha pertanian padi yang dimiliki oleh keluarga serta budaya pedesaan Jepang telah menjadi dasar dari kehidupan pedesaan Jepang dan sekarang sedang terancam oleh impor beras asing yang jauh lebih murah, serta munculnya kekhawatiran konsumen domestik akan adanya kesehatan makanan impor yang lebih rendah karena beda dari produksi dalam negeri jepang itu sendiri (Defite, 1998). Proteksi terhadap sektor pertanian inilah yang menjadi salah satu halangan terbesar bagi keikutsertaan Jepang dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Namun pemerintah Jepang juga berusaha untuk mengurangi dampak liberalisasi perdagangan, yaitu dengan memberikan pembayaran sampingan yang ditawarkan kepada produsen pertanian domestik (disebut "penanggulangan") untuk mengurangi dampak liberalisasi perdagangan. Sehingga memfasilitasi masuknya Jepang ke dalam perjanjian perdagangan bebas. Pemerintah Shinzo Abe telah berjanji untuk memperluas subsidi pendapatan yang dibayarkan langsung kepada petani dan menggandakan pendapatan pertanian dalam sepuluh tahun ke depan. Namun, satu perhitungan menunjukkan bahwa jika tarif pada lima item utama dihapuskan, pemerintah akan membutuhkan 2 triliun yen (\$ 20 miliar) per tahun hanya untuk mensubsidi petani padi. Pemerintahan Shinzo Abe juga dapat berupaya untuk memberikan kompensasi kepada petani melalui langkah-langkah konvensional untuk daging babi (Yoshimasa, 2013).

Beberapa langkah efektif lain untuk memperkuat industri pertanian Jepang dalam persiapan untuk meningkatkan

kompetisi internasional telah diambil atau diusulkan. Abe baru-baru ini mengumumkan strategi pertanian menghindari reformasi yang menyakitkan dan berfokus pada langkah-langkah memberikan lebih banyak bantuan keuangan kepada sektor ini. Ini dirancang untuk menyampaikan pesan politik kepada petani dan menurunkan biaya politik dalam negeri dari keputusan untuk bergabung dengan negosiasi TPP.

Sedangkan bagi pihak domestik yang pro, rencana bergabungnya Jepang dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Jepang dan merupakan strategi baru bagi pembangunan Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara mengatakan bahwa konsep Kemitraan TPP termasuk sekutu kunci Jepang, Amerika Serikat dapat membantu mendorong usaha-usaha yang dilakukan Jepang untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas guna meningkatkan ekspor. "Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik merupakan kerangka kerja menjanjikan bagi integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik," kata Maehara dalam sebuah acara konferensi bisnis Jepang-AS di Tokyo (Sidik, 2010).

Dalam perspektif internasional sendiri beberapa pakar politik di China skeptis dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan beragumen apabila perjanjian ini ialah alat yang ingin digunakan oleh Amerika Serikat bersama sekutunya untuk meredam kebangkitan China. *Institute of Asia-Pacific Studies* di bawah *Chinese Academy of Social Sciences* (CASS) mengatakan bahwa persaingan antara China dan Amerika Serikat adalah element yang penting dan harus disertakan dalam menganalisa *Trans-Pacific Partnership* (TPP) (Yuan, 2012). Karena dengan ini Jepang juga akan mendapatkan keuntungan apabila China dapat diredam perkembangannya yang telah signifikan dalam dua dekade terakhir, karena dengan demikian Jepang dapat menjadi kekuatan utama di wilayah Asia Timur. Sehingga terjadi sebuah hubungan simbiosis mutualisme untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Amerika Serikat

membutuhkan Jepang dan Jepang juga membutuhkan Amerika Serikat. Namun untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) Jepang melalui beberapa proses karena adanya pro dan kontra baik dari domestic maupun Internasional.

## **2. Bergabungnya Jepang dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP)**

Jepang merupakan negara yang banyak menjalin hubungan kerjasama baik secara hubungan bilateral atau kita kenal dengan dua negara maupun secara hubungan multilateral yaitu kerja sama dengan banyak negara. Dalam kerjasamanya terdapat banyak blok-blok perjanjian perdagangan bebas yang ada di wilayah International, salah satunya Asia-Pacific Economic Cooperation atau disingkat (APEC), yang kemudian membuat Jepang ingin bergabung dalam perjanjian kerja sama ekonomi lainnya yaitu perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dengan harapan dengan bergabungnya Jepang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di Jepang. Perjanjian ini berawal dari perjanjian perdagangan khusus yang bernama *Trans Pacific Straegic Economic Partnership* (TPSEP) yang berawal pada saat forum ekonomi antara 21 negara anggota APEC yang dilangsungkan pada tahun 1990-an oleh 5 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Singapura, Chile, Selandia Baru melakukan perundingan informal yang membahas tentang pembuatan kerjasama perdagangan di kawasan Asia Pasifik (Elms, et.al, 2012).

*Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan kerjasama berstandar tinggi yang berusaha untuk menghapus biaya pajak untuk perdagangan barang, jasa, dan pertanian, serta membangun dan memperluas peraturan yang membahas mengenai berbagai masalah termasuk hak kekayaan intelektual, inversati asing dan isu-isu mengenai perdagangan lainnya. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) bertujuan untuk meliberalisasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik. *Trans-Pacific*

*Partnership* (TPP) dilihat sebagai alat Amerika Serikat demi kepentingan perdagangan dan keamanan Amerika Serikat, namun disisi lain *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah ancaman bagi China di wilayah Asia-Pasifik.

Saat ini banyak negara di Asia yang sedang dalam proses mengkaji ataupun memperdebatkan tentang pembuatan keputusan apakah akan bergabung dengan kerjasama atau tidak seperti halnya negara anggota yang sedang mengkaji permasalahan ratifikasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP) (Elms, et.al, 2012). Banyak analisis yang berpendapat, negara yang pasti akan bergabung adalah Korea Selatan dan Kolombia, mengingat saat ini kedua negara tersebut terlibat perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat. Beberapa negara yaitu Indonesia, Korea Selatan, Filipina dan juga Thailand telah menyatakan untuk secara terbuka berminat bergabung setelah perundingan kedua pasca *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di ratifikasi di Taiwan juga telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam keanggotaan. Jika negara besar di Asia dan Taiwan bergabung, maka pengaruh *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di kawasan Asia Pasifik akan semakin besar. Kerjasama *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat memberikan perubahan politik domestik suatu negara dengan mendorong agenda domestik untuk melancarkan akses perdagangan beberapa negara yang berkembang ke pasar Amerika Serikat. Selain itu, dapat juga menjadi implementasi tujuan Amerika Serikat tentang hak-hak pekerja internasional, perlindungan lingkungan dan pembatasan perdagangan spesies langka.

Perdana Menteri Shinzo Abe pun dihadapkan dilema antara memilih untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan membuka pasarnya secara bebas atau tetap mempertahankan kebijakan proteksionismenya mengingat saat ini kondisi ekonomi Jepang sedang menurun. Meskipun demikian, hingga akhir dinyatakan persetujuan mengenai *Trans-Pacific Partnership* (TPP), Jepang masih

teguh mempertahankan kebijakan proteksionismenya, terutama dibidang agrikultur. Sektor pertanian Jepang sangat dilindungi karena adanya beberapa faktor seperti semakin meningkatnya penduduk Jepang sehingga memerlukan semakin banyak kebutuhan pangan dan semakin menyempitnya lahan pertanian karena adanya industrialisasi (Harada, 2019).

Pada awalnya Amerika Serikat merupakan negara yang sangat aktif mengajak Jepang untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dengan berbagai macam caranya yaitu memaparkan keuntungan apabila bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Namun kemudian tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena adanya pergantian kepemimpinan yang semula Amerika dipimpin oleh Obama dan sekarang pada kepemimpinan baru digantikan oleh Donald Trump. Padahal, selama pemerintahan Presiden Barack Obama, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan kesepakatan perdagangan untuk mengikat mitra dan aliansi perdagangan Amerika Serikat untuk menandingi ekspansi China. Sebanyak 12 anggota TPP merepresentasikan 40% ekonomi dunia. Serta pada kepemimpinan Presiden Barack Obama Amerika menjadi Negara yang terus mendorong keikutsertaan Jepang untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Sebelumnya Trump sudah menyatakan bahwa pada kampanyenya apabila dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dia akan menarik Amerika Serikat dari perjanjian dagang regional *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dalam pandangan Trump ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan Amerika Serikat karena terjadinya peningkatan pengangguran. Trump berjanji mengadakan renegotiasi Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau *North American Free Trade*

*Agreement* (NAFTA) dengan Meksiko dan Kanada. Keputusan eksekutif Trump tentang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebenarnya adalah simbolik semata. Pasalnya, kesepakatan itu belum diratifikasi oleh Kongres Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik. Trump berulang kali menegaskan, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) berpotensi menimbulkan bencana bagi Amerika Serikat karena mengganggu perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Politikus Partai Demokrat Senator Bernie Sanders mengatakan kepada BBC, dia mendukung keputusan Trump tersebut (Rai, 2017)

Namun Jepang tetap pada keputusannya untuk bergabung tepat pada tanggal 13 Maret 2013 Shinzo Abe mendeklarasikan niatan pemerintah untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan secara resmi diakui sebagai anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ketika Negara Jepang mengikuti perundingan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di Malaysia untuk pertama kalinya pada tanggal 23-25 Juli 2013. Putaran terakhir negosiasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), 5 oktober 2015 Jepang kemudian menyetujui untuk meningkatkan impornya tapi tetap membatasi impor bagi komoditas sektor agrikultur, yaitu beras. Majelis Rendah Jepang memutuskan untuk meratifikasi kemitraan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Pemungutan suara dilakukan di sidang umum spesial yang dilaksanakan pada hari Kamis. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di dukung oleh partai perdana menteri Shinzo Abe Liberal Demokrat, partai Komeito, dan Partai Inovasi Jepang. Partai Komunis Jepang menjadi satu-satunya partai yang menolak, sementara Partai Demokratik, Partai Liberal, dan partai

Sosial Demokrat memboikot pemungutan suara. (Kevin, 2016)

### **C. Rencana Amerika Serikat Keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP)**

*Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan sebuah blok perdagangan bebas yang diinisiasikan oleh Presiden Barack Obama. Perjanjian perdagangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ditanda tangani Presiden Barack Obama. Kemitraan ini dirundingkan oleh Australia, Brunei, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam pada Agustus 2013. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sedianya akan menjadi kesepakatan perdagangan regional yang terbesar dalam sejarah yang meliputi hampir 40 persen perekonomian dunia dan sekitar sepertiga perdagangan dunia. Kesepakatan itu dinegosiasikan di bawah Presiden Barack Obama, yang mengatakan penting bahwa Amerika Serikat, dan bukan China, yang menulis aturan-aturan ekonomi global (Lamarque, 2017). Amerika Serikat lebih gencar dan berperan aktif serta terus secara mendorong Negara-negara lain agar bergabung kedalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Salah satu Negara yang begitu gencar didorong Amerika Serikat untuk bergabung kedalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ialah Indonesia dan Jepang, akan tetapi Indonesia belum memperlihatkan ketertaikannya untuk bergabung kedalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Sebaliknya, Jepang yang secara nyata sudah menjadi Mitra strategis Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung ke *Trans-Pacific Partnership* (TPP) atau Kemitraan Lintas Pasifik pada Mei 2013.

Amerika Serikat telah mengajak Jepang masuk ke *Trans-Pacific Partnership* (TPP) melalui diskusi iniformal sejak november 2011, ketika Pedana Menteri Jepang yaitu Noda menyatakan ketertarikannya untuk bergabung ke *Trans-*

*Pacific Partnership* (TPP). Selanjutnya, Pada tanggal 12 April 2013, Amerika Serikat menegaskan dukungannya untuk Jepang masuk dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Pada tanggal 20 April 2013, di sela-sela pertemuan para menteri perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 11 mitra *Trans-Pacific Partnership* (TPP) mengumumkan bahwa mereka telah mengundang Jepang untuk bergabung dengan negosiasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), setelah anggota menyelesaikan prosedur pemberitahuan masing-masing Negeri, termasuk Amerika Serikat pemberitahuan presiden untuk Kongres. Pada tanggal 24 April dalam sebuah surat kepada Speaker Amerika Serikat John Boehner, membahas mengenai hubungan Jepang-Amerika Serikat berlangsung. Keinginan Amerika Serikat untuk memulai negosiasi dengan Jepang lebih awal 90 hari dari yang direnakan sebelumnya. Pada tanggal 26 Juli 2013, Jepang memutuskan bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

*Trans-Pacific Partnership* (TPP) digambarkan sebagai perjanjian 'standar tinggi' yang diarahkan untuk menangani masalah perdagangan di abad ke-21. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) berusaha untuk menghapus biaya pajak untuk perdagangan barang, jasa, dan pertanian, serta membangun dan memperluas peraturan yang membahas mengenai berbagai masalah termasuk hak kekayaan intelektual, inversasi asing dan isu-isu mengenai perdagangan lainnya. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) bertujuan untuk meliberalisasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Namun kemudian Amerika memutuskan untuk keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena adanya pergantian kepemimpinan yang semula Amerika dipimpin oleh Barack Obama dan sekarang pada kepemimpinan baru digantikan oleh Donald Trump. Sebelumnya Donald Trump telah mengutarakan niatnya untuk keluar dan menghentikan kesepakatan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada kampanyenya apabila dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dia akan menarik Amerika Serikat dari perjanjian

dagang regional *Trans-Pacific Partnership* (TPP) (Mauliana, 2017).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan dengan CEO industri otomotif Amerika Serikat di Gedung Putih, Washington, 24 Januari 2017 mengatakan

"Kita akan melakukan perdagangan tetapi kita akan melakukannya dengan masing-masing negara. Dan jika ada yang bertingkah, kita akan mengirim surat peringatan penghentian, 30 hari dan mereka harus meluruskan itu, atau kita pergi. Tak satu pun dari perjanjian ini mencegah kita keluar jika menjadi merugikan. Jadi kita akan memiliki banyak perjanjian perdagangan. Tapi *Trans-Pacific Partnership* (TPP) itu bukan cara yang benar".

Dalam pandangan Trump, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan Amerika Serikat karena terjadinya peningkatan pengangguran. Tindakan Presiden Donald Trump ini untuk menepati janji utama kampanyenya. Donald Trump selama ini sudah mengecam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan perdagangan multinasional lainnya, dengan alasan orang Amerika kehilangan pekerjaan karena para pengusaha memindahkan operasi mereka ke luar negeri untuk mencari tenaga kerja yang lebih murah (Lamarque, 2017).

Dalam memenuhi janji kampanyenya untuk mengakhiri keterlibatan Amerika di keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP), Trump menandatangani

sebuah perintah eksekutif di *Oval Office* untuk menarik Amerika Serikat dari 12 negara *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Yang pada akhirnya setelah kemenangannya Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memutuskan mengundurkan diri dari kesepakatan perdagangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada Senin, 23 Januari 2017 waktu setempat (eko, 2017). Bahkan sebelum mengumumkan pencalonan dirinya, Trump sudah menyatakan bahwa Kemitraan Trans Pasifik merupakan serangan terhadap bisnis Amerika. Ini tidak menghentikan manipulasi mata uang China. Ini adalah kesepakatan yang buruk. Perjanjian tersebut akan memangkas lebih dari 18.000 tarif, termasuk untuk semua barang yang diproduksi AS dan hampir semua produk pertanian Amerika. Kesepakatan itu berusaha mengakhiri eksploitasi buruh anak dan menetapkan kondisi kerja yang dapat diterima bagi buruh harian dengan upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja. Trump mengatakan dia tidak menentang perjanjian perdagangan, tetapi ingin ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat dan para pekerjanya (Lamarque, 2017).

Beberapa hal yang dialami oleh negara-negara anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dengan keluarnya Amerika Serikat, salah satunya bagi negara Jepang dipandang sebagai pukulan, karena Jepang telah menghabiskan banyak modal politik untuk memperjuangkan perjanjian dagang tersebut. Jepang adalah negara terakhir yang bergabung, yang akan memberikan akses bebas tarif kepada pabrikannya ke pasar ekspor di Amerika Serikat dan negara-negara Asia lainnya, tetapi akan membawa pembuat mobilnya ke

dalam persaingan negara-negara dengan upah lebih rendah seperti Meksiko. Perdana Menteri Shinzo Abe menjadi panggilan kuat setelah melakukan konsesi yang menyakitkan secara politis atas impor pertanian yang telah dicari Amerika Serikat.

Hal yang dapat terjadi selanjutnya, Amerika Serikat dapat menegosiasikan kembali pakta tersebut atau Asia dapat melanjutkan dengan kesepakatan perdagangan alternatif yang didukung oleh China. Amerika Serikat tidak mungkin meninggalkan perjanjian dagang yang menyumbang lebih dari 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan membiarkan pintu terbuka bagi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang didukung Cina. Menurut Philip Jeyaretnam, penasihat senior dan kepala eksekutif regional di Dentons Rodyk yang berbasis di Singapura “Sebagian besar diplomasi ekonomi China bermanfaat, tetapi biaya tersembunyinya adalah bahwa, pada tahap ini, Tiongkok tidak berkomitmen pada sistem perdagangan terbuka yang telah berusaha dibangun oleh Amerika Serikat, dan kemungkinan tidak akan mempromosikan perdagangan terbuka dalam layanan atau mengurangi Hambatan lintas seperti subsidi”. Jika Washington kembali ke meja perundingan, ia mungkin akan mencoba untuk mengekstraksi konsesi yang lebih besar, mengingat pemilihan Donald Trump menggertak atas perdagangan internasional. Pada saat yang sama, para penandatangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) tidak cenderung membungkuk mundur untuknya, sehingga negosiasi yang berlarut-larut untuk pakta perdagangan yang direvisi dapat diharapkan. (unkwon, 2017) Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru dan Jepang berharap untuk

menyelamatkan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dengan mendorong Cina dan negara-negara Asia lainnya untuk bergabung. Australia memimpin upaya untuk menyelamatkan kesepakatan itu. Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan pada hari Selasa 24 Januari bahwa ia telah mengadakan diskusi dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Selandia Baru Bill English dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tentang kemungkinan melanjutkan dengan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) tanpa Amerika Serikat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Jepang mendapat penentangan dalam negeri maupun luar negeri dengan keputusannya bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) serta keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena adanya pergantian kepemimpinan yang mana sebelumnya menjadi Negara yang sangat memberikan dukungan dan dorongan agar Jepang bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Namun Jepang tetap pada keputusannya untuk bertahan dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dengan ikut serta dalam diskusi bersama Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Selandia Baru Bill English dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk membahas tentang kemungkinan melanjutkan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) tanpa Amerika Serikat. Sehingga sampai sekarang Jepang masih tetap bertahan dalam keanggotaannya di *Trans-Pacific Partnership* (TPP).